

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian khususnya dalam penentu dan pelaksana arah kebijakan pembangunan negara. Dinamika perekonomian daerah tidak lepas dari keberadaan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak diimplementasikannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 1999. Ketergantungan pemerintah daerah yang besar terhadap transfer pemerintah pusat menunjukkan bahwa transfer pusat telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk terciptanya *Sustainable Development Goals* yang bertujuan guna menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi.

Sebagai negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Pemerintah sangat bergantung pada pendapatan negara yang salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak dan akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi.

Setiap negara mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat disetiap tahun berjalan. Pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab sehat tidaknya perekonomian suatu Negara dan pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Pertumbuhan ekonomi ialah keadaan perekonomian yang berfluktuasi sesuai situasi cenderung menjadi keadaan yang lebih baik serta menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi. Bila suatu negara tidak dapat meningkatkan pertumbuhannya maka akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang baru seperti tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi (Salim & Fadilla, 2021).

Saat ini, Indonesia telah memperkenalkan otonomi daerah dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola perekonomiannya. Hal ini terlihat dari lahirnya UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur anggarannya sendiri dengan campur tangan pemerintah pusat yang minimal. Di era otonomi daerah, mereka tidak lagi hanya memenuhi instruksi dari pusat, tetapi justru memiliki kekuatan untuk meningkatkan kreativitas guna mengembangkan potensi-potensi yang dianggap terbatas di era otonomi. Pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih mandiri, yang akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, tidak hanya dari segi pendanaan, tetapi juga dari segi kemampuan daerah. Pemerintah daerah diharapkan menyatukan berbagai fungsi publik untuk meningkatkan kepercayaan, dan diharapkan pula partisipasi masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat.

Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang tercermin dalam APBD dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik. Dari dua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah merupakan jenis pengeluaran yang dominan dalam pengeluaran pembangunan di sebagian besar di daerah maupun di sebagian besar daerah di Indonesia. Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman beserta bunga dan subsidi. Semua jenis pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pengeluaran konsumsi. Sedangkan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik terbagi menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi di atas diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu

menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; penyelenggaraan tugas pembantuan, terdapat dari tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; serta tugas umum pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran Negara atau disebut juga dengan belanja Negara. Belanja pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan (Mahzalena & Juliansyah, 2019).

Tidak hanya dalam pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah pun menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Bahl et al., 2003) bahwa desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan daerah untuk memperoleh penerimaan daerah seperti penerimaan pajak, karena penerimaan daerah mempunyai pengaruh sebagai sumber dana dalam melakukan pembangunan. Sesuai dengan UU No 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara. Sehingga meningkatnya penerimaan pajak dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pemerintah dan kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional, asalkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk menunjang pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Habib Saragih, 2018). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Salah satu komponen penting dalam pertumbuhan nasional adalah pembangunan daerah. Gagasan otonomi daerah dapat dipraktikkan dan sumber daya daerah dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui pembangunan daerah. Kabupaten dan kota dalam suatu daerah otonom mempunyai andil dalam menentukan jalannya pemerintahan sendiri, dengan provinsi sebagai koordinator dan memegang tanggung jawab serta wewenang untuk kepentingan umum. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan untuk

mencapai target pembangunan dan menciptakan stabilitas perekonomian. Tujuan dari kebijakan fiskal secara umum adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter bersifat dinamis disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. (Paramita, 2021)

Selain penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi (Maulana Heri, 2020). Masing-masing jenis dari infrastruktur memiliki bentuk berbeda-beda dan pastinya memiliki peranan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jenis infrastruktur ekonomi disini adalah sarana prasarana yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat secara luas. Sarana prasarana tersebut antara lain jalan, air, listrik, dan masih ada beberapa lainnya. Infrastruktur jalan, listrik, dan air ini sangatlah penting di masyarakat. Dengan adanya ketiga infrasturktur utama tersebut, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi kemudian juga terciptanya pembangunan ekonomi yang merata dan pastinya akan terjadi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Hutajulu, 2021). Salah satu yang menghambat perekonomian di masyarakat adalah lambatnya pembangunan infrastruktur dan keterbatasan. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana yang ada dimasyarakat.

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan.

Dalam publikasi (Bank Indonesia Provinsi Lampung, 2022) dituliskan bahwa secara sektoral, Perekonomian Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan IV 2021 mencapai 28,39%, sektor industri pengolahan dengan pangsa 19,65% dan sektor perdagangan dengan pangsa mencapai 11,70%. Kebijakan fiskal pemerintah melalui APBN dan APBD belum optimal menstimulus perekonomian Lampung. Pengeluaran pemerintah justru menyumbang -0,2 persen kontraksi pertumbuhan ekonomi Lampung. Belanja APBN baru terealisasi 21,2 persen dari pagu. Sementara APBD lingkup Provinsi Lampung secara agregat mencatatkan surplus 1,80 triliun sampai triwulan I 2021 dengan rincian realisasi pendapatan sebesar 4,8 triliun dan belanja sebesar 3,08 triliun.

Gambar 1.1.
PDRB Provinsi Lampung



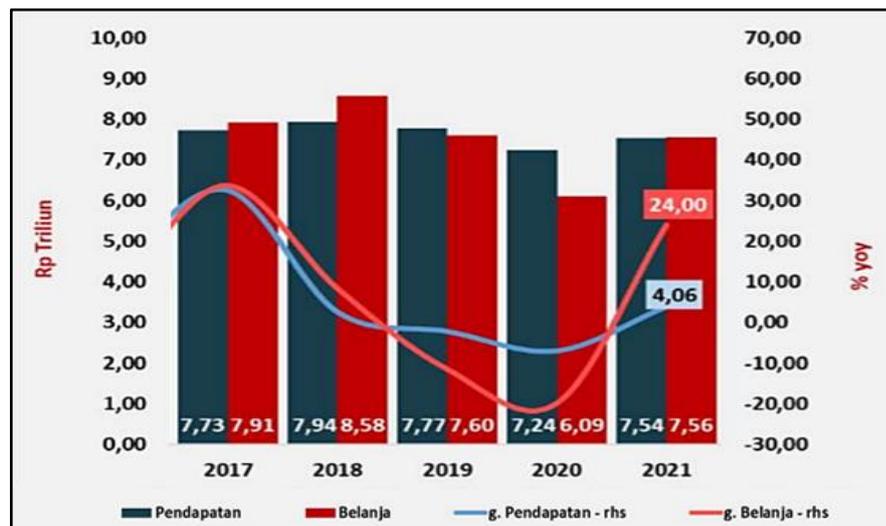
Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Secara umum, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,15% (yoy) pada triwulan IV 2021, meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 3,00% (yoy) (Gambar 1.1.). Realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2020 yang tercatat terkontraksi sebesar 2,25% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 didorong oleh kinerja positif sebagian besar Lapangan Usaha (LU) serta peningkatan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tengah termoderasinya kinerja ekspor. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Lampung lebih tinggi dibandingkan Nasional yang tumbuh 5,02% (yoy).

Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan IV 2021 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp92,28 triliun dan Rp60,32 triliun. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah, keberhasilan suatu daerah dalam

meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai (Zahari, 2017).

Gambar 1.2.
Perkembangan APBD Provinsi Lampung



Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Sampai dengan triwulan IV 2021 (data s.d. Desember 2021), realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp7,47 triliun atau mencapai 99,06% dari target penerimaan pendapatan di tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp7,54 triliun. Pencapaian ini terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,02 triliun atau terserap sebesar 96,92% dari target pendapatan APBD tahun 2020 (Gambar 1.2). Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya realisasi pos penerimaan dari Pendapatan Transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat meningkat masing-masing sebesar 67,81% (yoy) dan 14,21% (yoy). Adapun peningkatan pada komponen PAD disumbang oleh Pendapatan Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar 199,74% di triwulan IV 2021 serta Pendapatan Pajak Daerah

dengan realisasi sebesar 102,54%. Kenaikan realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 149,42% (yoy) untuk komponen Pendapatan Retribusi Daerah dan sebesar 97,25% (yoy) untuk Pendapatan Pajak Daerah di tahun 2020. Selain pada pos PAD, pada pos Pendapatan Transfer juga terdapat kenaikan realisasi pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 70,67% (yoy).

Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung pada triwulan IV 2021 tercatat mencapai Rp7,10 triliun atau sebesar 93,92% dari target anggaran belanja tahun 2021 yang sebesar Rp7,58 triliun. Secara nominal dan persentase, realisasi anggaran belanja di periode ini tercatat mengalami kenaikan 1,87% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,97 triliun atau 94,40% dari target belanja APBD tahun 2020 (Gambar 1.2). Kenaikan realisasi belanja daerah pada periode laporan terutama didorong oleh penyerapan anggaran pada pos Belanja Operasi sebesar Rp5,15 triliun (96,25%) di triwulan IV 2021 dari Rp4,86 triliun (95,59%) pada triwulan IV 2020. Secara rinci, peningkatan realisasi belanja daerah pada pos dimaksud terutama ditopang oleh adanya kenaikan realisasi komponen Belanja Bunga (Rp22,16 miliar atau 98,50%); Belanja Hibah (Rp1,68 triliun atau 97,36%), Belanja Pegawai (Rp1,93 triliun atau 96,68%) serta belanja Barang dan Jasa (Rp1,50 triliun atau 94,47%). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi perbaikan ekonomi regional yang terdampak pandemi *Covid-19* selama tahun 2021.

Kondisi perekonomian yang melambat dampak dari pandemi Covid-19, kontribusi belanja pemerintah lebih dibutuhkan untuk dapat segera memperbaiki

kondisi perekonomian, karena belanja pemerintah memiliki efek jangka pendek dalam perekonomian dibandingkan dengan investasi terutama terkait dengan pengadaan aset tetap (Kementerian Keuangan, 2019). Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang pulau Sumatera menjadi sebuah daerah yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan ditopang oleh industri jasa dan pariwisata, Provinsi Lampung terus berusaha melebarkan akses jaringan informasi dan teknologi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Lampung.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam era digitalisasi cukup besar. Tantangan pertama adalah masih cukup banyak daerah yang belum terjangkau sinyal (*blindspot*) sehingga akses jaringan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan infrastruktur yang belum memadai, sulitnya akses untuk pembangunan serta populasi yang masih sedikit di daerah tersebut sehingga valuasi ekonomi rendah. Dilihat dari alokasi anggaran berdasarkan klasifikasi urusan, kebijakan Pemerintah Daerah lebih menitik beratkan pada pelayanan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian di wilayah provinsi Lampung (Kementerian Keuangan, 2019).

Pada saat tahun 2023 terdapat kejadian salah satu masyarakat dari Lampung melalui akun tiktok @awbimaxreborn atau dengan nama asli Bima Yudho Saputra dilaporkan kepada pihak kepolisian akibat mengkritisi Pemerintahan Lampung. Video berdurasi 3 menit tersebut ditampilkan dengan cara mempresentasikan menggunakan laptop dan memberikan kritiknya dengan judul “Alasan Lampung Gak Maju-Maju”. Terakumulasi beberapa poin dalam video kritik tersebut, mulai dari sistem pendidikan yang lemah, tata kelola kota

yang kurang, ketergantungan pada salah satu sektor khususnya pertanian, dan infrastruktur terbatas yang menjadi sorotan utama dalam narasi yang disampaikan oleh salah seorang konten kreator tersebut. Maka perlu adanya penguatan yang menyeluruh dalam implementasi fungsi ekonomi pemerintahan, yaitu upaya optimalisasi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, terutama untuk belanja yang berkaitan dengan infrastruktur sehingga kita dapat melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan infrastruktur. Maka peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak, dan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?
2. Apakah Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?
3. Apakah Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Beberapa faktor yang dapat diteliti ialah Variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan infrastruktur Jalan dan variabel terikat ialah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 hingga tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi dalam disiplin ilmu yang dipelajari.
2. Bagi pemerintah, dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, khususnya kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro maupun fiskal ekonomi.
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai informasi bagi peneliti yang berminat mengembangkan penelitian lebih lanjut.